



DEGRADASI NILAI PANCASILA DI ERA DIGITAL: ANALISIS KASUS PELEMPARAN BOM MOLOTOV SISWA DI KALIMANTAN BARAT

Azkie Ramadhan¹⁾, Lusy Liany²⁾, Intan Aisyah Azzahra³⁾,

Nabila Adrianti⁴⁾, Siti Dzira Alifa Humaira⁵⁾

^{1,3,4,5)}Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas YARSI

²⁾Fakultas Hukum, Universitas YARSI

Abstrak

Era digital telah mengubah cara remaja berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk pemahaman mereka tentang kehidupan sosial. Bersama dengan manfaat yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, berbagai masalah sosial juga muncul, termasuk meningkatnya kecenderungan kekerasan di kalangan siswa. Studi ini membahas degradasi nilai-nilai Pancasila melalui kasus serangan bom molotov yang dilakukan oleh seorang siswa SMP di Kalimantan Barat dari perspektif pendidikan karakter. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bentuk-bentuk penurunan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam insiden tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada melemahnya kesadaran moral di kalangan remaja, dan menganalisis pentingnya penguatan pendidikan karakter di era digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan meneliti buku, jurnal akademik, peraturan hukum, dan fenomena sosial yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa insiden tersebut mencerminkan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan, empati, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik secara damai di kalangan remaja. Faktor-faktor seperti perundungan, kurangnya pengawasan keluarga, paparan negatif terhadap konten digital, dan terbatasnya implementasi pendidikan karakter kontekstual berkontribusi secara signifikan terhadap perilaku agresif di kalangan siswa. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila dan pendekatan restoratif sangat penting dalam mengembangkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga berlandaskan moral, bertanggung jawab secara sosial, dan mampu menanggapi tantangan era digital dengan bijak.

Kata Kunci: Pancasila, Era Digital, Karakter, Keadilan Restoratif.

*Correspondence Address : azkyaramadhanza@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v13i7.2026. 1878-1888

© 2026UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam cara generasi muda memahami dunia di sekitarnya. Kehadiran internet dan media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan telah membentuk ruang baru yang memengaruhi pola pikir, cara berinteraksi, hingga pembentukan karakter remaja. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi, memperluas wawasan, dan membuka akses pendidikan tanpa batas. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan tantangan sosial yang tidak sederhana. Arus informasi yang bergerak begitu cepat sering kali membuat remaja kehilangan ruang refleksi dalam membedakan mana nilai yang layak diteladani dan mana perilaku yang justru dapat merusak kesadaran moral mereka.

Fenomena tersebut semakin terlihat melalui meningkatnya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk bertumbuh dan belajar perlahan menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perundungan, ujaran kebencian, intoleransi, hingga tindakan agresif antar pelajar kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa yang asing. Dalam banyak kasus, kekerasan justru muncul dari lingkungan yang semestinya menjadi tempat pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan intelektual generasi muda tidak selalu

berjalan seiring dengan kematangan emosional dan moralitas sosial mereka.

Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik adalah kasus pelemparan bom molotov yang dilakukan oleh seorang pelajar SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Tindakan tersebut bukan hanya menghadirkan ancaman fisik terhadap lingkungan sekolah, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai kondisi moral generasi muda saat ini. Ketika seorang pelajar memilih kekerasan sebagai jalan pelampiasan emosi, maka persoalannya tidak lagi berhenti pada aspek pelanggaran hukum semata. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya kegagalan dalam membangun kesadaran kemanusiaan, pengendalian diri, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara bijaksana di kalangan remaja.

Perkembangan era digital memperumit tantangan tersebut. Remaja saat ini hidup di tengah ruang virtual yang bergerak sangat cepat dan sering kali dipenuhi konten agresif, budaya instan, serta pola komunikasi yang miskin empati. Media sosial pada akhirnya bukan hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga arena pembentukan identitas sosial remaja. Dalam situasi tertentu, paparan kekerasan yang terus-menerus dapat mengikis sensitivitas moral dan membuat perilaku agresif terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan degradasi moral remaja tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola interaksi sosial yang dibentuk oleh teknologi digital. (Septiani et al., 2025)

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa melemahnya karakter remaja dipengaruhi oleh

berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian (Setiawan et al., 2024) menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital dan lemahnya kontrol sosial memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya perilaku agresif di kalangan pelajar. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sari & Najicha, 2022) menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai filter moral dalam kehidupan masyarakat terutama di era digital dapat memengaruhi sensitivitas emosional remaja dan membentuk pola perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Sementara itu, (Lestari & Kurnia, 2022) menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila perlu dikembangkan secara lebih kontekstual agar mampu menjawab tantangan sosial generasi muda di era digital. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengaitkan kasus kekerasan pelajar dengan degradasi nilai-nilai Pancasila dalam perspektif pendidikan karakter masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian ini memiliki relevansi penting, baik secara akademik maupun sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana degradasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kasus pelemparan bom molotov oleh pelajar SMP di Kalimantan Barat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku kekerasan di kalangan remaja pada era digital. Penelitian ini juga berupaya melihat kembali urgensi pendidikan karakter berbasis Pancasila sebagai fondasi moral dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati sosial, kedewasaan emosional, dan tanggung jawab kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Landasan Teori

1. Pancasila sebagai Fondasi Moral

Pancasila merupakan dasar nilai yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bukan hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai arah etis dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadaban. Di tengah perkembangan era digital yang berlangsung cepat, Pancasila memiliki peran penting sebagai penuntun moral agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak kehilangan orientasi nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian (Permatasari et al., 2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam praktik sosial dan kesadaran hukum masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol formal negara. Ketika nilai tersebut mulai melemah, berbagai persoalan seperti kekerasan, intoleransi, dan menurunnya solidaritas sosial akan lebih mudah muncul. Sejalan dengan itu, dalam menegaskan bahwa Pancasila mengandung dimensi kemanusiaan yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dalam lingkungan pendidikan, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi penting sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Penelitian (Liany et al., 2017) menunjukkan bahwa pendidikan dan pembinaan berbasis nilai Pancasila mampu meningkatkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan kesadaran sosial di kalangan pelajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila perlu dilakukan secara kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan remaja.

2. Degradasi Moral Remaja di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial remaja secara signifikan. Media sosial dan ruang virtual

memang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi pada saat yang sama juga membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan moral generasi muda. Remaja menjadi kelompok yang rentan karena berada pada fase pencarian jati diri dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial digital. (Sari & Najicha, 2022), menjelaskan nilai-nilai Pancasila sejatinya berfungsi sebagai fondasi moral dan filter utama dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi generasi muda dalam merespons arus informasi digital. Lemahnya internalisasi nilai-nilai ini membuat remaja rentan kehilangan kendali diri saat menghadapi tekanan sosial di ruang virtual, sehingga mereka cenderung merespons konflik dengan tindakan destruktif. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sebagaimana ditegaskan oleh (Nur et al., 2023)

dalam kajiannya mengenai Pendidikan Pancasila, hubungan sosial di era digital cenderung bergeser menjadi lebih individualistik dengan minimnya kedekatan emosional yang tulus dalam relasi antarsiswa. Fenomena ini menciptakan hambatan bagi remaja dalam membangun empati, sehingga mereka lebih rentan terjebak dalam konflik sosial akibat ketidakmampuan mengelola interaksi secara arif. Dengan demikian, degradasi moral pada remaja tidak dapat dilihat sebagai kegagalan individu semata, melainkan dampak dari pergeseran budaya komunikasi dan lingkungan sosial yang kini lebih mementingkan konektivitas digital dibandingkan keterikatan kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila."

3. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila

Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan moral dan kepribadian peserta didik melalui

penanaman nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kemanusiaan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga bertujuan membentuk individu yang mampu menghargai sesama, mengendalikan diri, dan bertindak secara bijaksana dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, pendidikan karakter memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Pancasila. (Liany & Anisariza, 2025) menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter perlu dilakukan secara partisipatif dan kontekstual agar peserta didik mampu memahami relevansi nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang hanya bersifat formal dan teoritis sering kali tidak mampu menyentuh kesadaran moral peserta didik secara mendalam.

4. Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak

Kekerasan yang dilakukan oleh remaja tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan kegagalan pembinaan moral. Anak yang berhadapan dengan hukum masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional sehingga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang lebih manusiawi. Dalam upaya menangani kasus yang melibatkan anak, pendekatan restorative justice menjadi langkah yang jauh lebih relevan dibandingkan dengan pola penghukuman yang bersifat represif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Setiawan et al., 2024), keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan ruang dialog serta upaya pemulihan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembinaan moral pelaku agar menyadari dampak dari perbuatannya.

Hal ini sejalan dengan pandangan (Liany, 2011) yang menegaskan bahwa bagi pelaku usia anak, proses rehabilitasi dan pembinaan jauh lebih esensial daripada sekadar penghukuman, karena bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak serta memastikan mereka tetap mendapatkan hak pendidikan dan kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena degradasi nilai-nilai Pancasila di era digital melalui kasus pelemparan bom molotov oleh pelajar SMP Negeri 3 Kalimantan Barat dalam perspektif pendidikan karakter. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas sosial, perilaku remaja, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter, degradasi moral remaja, dan pendekatan restorative justice. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap fenomena sosial yang berkembang di era digital sebagai bagian dari penguatan kajian penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan,

menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai konsep teoritis dengan fenomena sosial yang terjadi. Analisis dilakukan secara sistematis agar mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara degradasi nilai-nilai Pancasila, perkembangan era digital, dan pentingnya penguatan pendidikan karakter di kalangan remaja.

Adapun alur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data dan literatur, analisis teori dan fenomena sosial, interpretasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis agar penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai persoalan yang dikaji.



Gambar 1. Alur Penelitian

Gambar alur penelitian tersebut menjelaskan tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan literatur dan data, analisis teori serta fenomena sosial, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dan pembahasan. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan mengenai degradasi nilai-nilai Pancasila di era digital serta pentingnya penguatan pendidikan karakter dan pendekatan restoratif bagi remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Degradasi Pancasila dalam Nilai-Nilai Perspektif Kemanusiaan

Kasus pelemparan bom molotov di lingkungan sekolah bukan sekadar peristiwa kriminalitas remaja, melainkan sebuah sinyal bahwa terdapat "ruang kosong" dalam internalisasi nilai Pancasila. Pancasila yang seharusnya menjadi kompas moral, kini tampak berjarak dengan realitas kehidupan keseharian peserta didik. Dalam kacamata pendidikan karakter, tindakan tersebut mencerminkan kerentanan emosional yang akut. Pelaku seolah kehilangan orientasi akan nilai martabat manusia yang diamanatkan dalam sila kedua. Ketika konflik batin diselesaikan dengan cara destruktif, maka nilai musyawarah (sila keempat) dan keadilan sosial (sila kelima) terpinggirkan oleh egoisme sesaat. Fenomena ini diperburuk oleh pergeseran budaya sekolah yang terkadang terlalu kompetitif dan kurang memberi ruang bagi kesehatan mental, sehingga sekolah yang seharusnya menjadi safe space justru memicu frustrasi (Audina et al., 2026). Hal ini senada dengan temuan bahwa pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan bagi individu sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat (Liany & Anisariza, 2025).

Untuk memperjelas kaitan antara perilaku menyimpang dengan pengikisan nilai-nilai Pancasila, berikut disajikan matriks analisis keterkaitan:

Tabel 1. Analisis Pelanggaran Nilai Pancasila pada Tindakan Agresif Remaja

Pancasila	Bentuk Penyimpangan	Dampak terhadap Lingkungan Sosial
Sila 1	Kehilangan tanggung jawab moral	Pudarnya kesadaran spiritualitas
Sila 2	Tindakan kekerasan fisik	Cedera martabat kemanusiaan
Sila 3	Menciptakan rasa takut	Terkikisnya harmoni sosial sekolah
Sila 4	Menolak dialog/musyawarah	Dominasi agresivitas dalam konflik
Sila 5	Pelanggaran hak rasa aman	Ketimpangan perlakuan dalam pendidikan

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukan satu hal yang asing. Di tengah kehidupan global yang sangat kompleks, Pancasila dapat menjadi salah satu fondasi bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Liany et al., 2017). Tak hanya itu, Pancasila menjadi sendi dalam setiap peraturan perundang-undangnya yang menunjukkan bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sehingga patut dipahami nilai moralitasnya dan tidak dilanggar (Permatasari et al., 2020). Berbagai kejadian di Indonesia akhir-akhir ini dapat menjadi alarm adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yakni kasus pelemparan bom molotov di Kalimantan

Barat yang terbukti melanggar nilai-nilai Pancasila. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan bahwa setiap agama mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan larangan untuk menyakiti sesama manusia tidak peduli latar belakang agamanya. Kasus pelemparan bom termasuk dalam gerakan terorisme yang bertolak belakang dengan sila pertama Pancasila karena sila pertama menyatakan bahwa individu tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan (Tanamal & Siagian, 2020).

Perilaku menyimpang dalam kasus pelemparan bom di lingkungan sekolah tentu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral ketuhanan. Hal ini menunjukkan adanya kepuaran dalam kesadaran spiritualitas. Sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Maret et al., 2026) Kasus pelemparan bom molotov menyebabkan adanya korban luka. Sila ini jelas dilanggar dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena menunjukkan adanya tindakan kekerasan terhadap sesama manusia serta mengancam keselamatan dan nyawa orang lain. Kasus ini juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena mendorong munculnya tindakan kekerasan, pembunuhan, dan kematian yang bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan (Tanamal & Siagian, 2020). Selain itu, penggunaan cara kekerasan oleh remaja untuk menyelesaikan masalah seperti kasus pelemparan bom ini dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap perkembangan mereka terutama terkait rusaknya nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkungan sosialnya secara luas (Audina et al., 2026). Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia.

Kasus pelemparan bom molotov ini merupakan salah satu tindakan teror

yang merusak keharmonisan masyarakat dan mengancam rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat memunculkan ketakutan kolektif yang merusak persatuan bangsa. Ancaman ketakutan semacam ini dapat membuat perpecahan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sangat berhubungan dengan sila ketiga Pancasila (Sila Ke- et al., 2023). Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kasus ini mencerminkan adanya tindakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip musyawarah (Permatasari et al., 2020). Pelaku dalam kasus ini lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan mengambil jalan kekerasan dibandingkan jalan yang benar dalam menyelesaikan masalah secara lebih demokratis dan beradab misalnya seperti berunding atau musyawarah dengan guru, orang tua, atau pihak berwenang. Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan kekerasan dan tindakan anarkis. (Anshar & Setiyono, 2020)

Sila kelima berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kasus pelemparan bom molotov berdampak pada hilangnya rasa aman dan hak atas keselamatan bagi seluruh warga sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah melanggar prinsip keadilan sosial dimana korban dalam hal ini seluruh warga sekolah tentu telah kehilangan rasa aman dan akan mengalami trauma atau ketakutan dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan sekolah. Dalam sila kelima juga menunjukkan bahwa seharusnya seluruh warga masyarakat harus ikut andil dalam melindungi hak yang melingkari setiap warga negara agar tidak ada yang merasa

tertindas dan tidak ada yang membatasi hak-hak sesama warga (Kevin Ervianto, 2025).

Melemahnya internalisasi nilai Pancasila dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Lemahnya ketahanan keluarga dalam membangun komunikasi emosional yang hangat membuat anak-anak lebih mudah mencari "validasi" di luar, terutama di ruang digital yang tidak terkontrol. Di dunia maya, remaja sering terpapar pada normalisasi kekerasan. Sesuai dengan teori pembelajaran sosial, paparan konten destruktif yang berulang secara perlahan mengikis empati remaja (Liany et al., 2025). Mereka sering kali tidak memiliki literasi digital yang cukup untuk menyaring mana yang merupakan konstruksi perilaku menyimpang dan mana yang merupakan nilai-nilai luhur. Pendidikan yang selama ini hanya bersifat formalistik-teoretis gagal membekali mereka dengan "imunitas" moral di era digital. Hal ini relevan dengan temuan bahwa pendidikan nilai harus lebih dari sekadar hafalan; nilai-nilai Pancasila perlu hadir sebagai living values yang terintegrasi dalam perilaku sosial siswa (Liany & Anisariza, 2025).

Reaktualisasi Pendidikan: Menuju Pendekatan Restoratif

Respons terhadap fenomena di atas, pendidikan karakter harus bergeser dari pola penghukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif dan manusiawi. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seharusnya dipandang sebagai pribadi yang memerlukan bimbingan, bukan sekadar penjahat yang harus disingkirkan. Pendekatan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam pembangunan hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat (Permatasari et al., 2020). Melalui dialog yang partisipatif, sekolah dapat berperan sebagai fasilitator pemulihan karakter, di

mana pelaku diajak memahami dampak perbuatannya. Ketika siswa dilibatkan dalam pengalaman sosial yang humanis, nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah tertanam dalam kesadaran mereka. Langkah konkret yang diperlukan mencakup:

Pertama, Pendidikan Karakter Berbasis Empati: Mengganti hafalan teori dengan praktik langsung, seperti kerja sosial, diskusi kelompok, dan resolusi konflik. Pendidikan karakter ini juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebab Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara memiliki peran fundamental dalam membentuk moral dan etika masyarakat. Pancasila mengandung nilai luhur yang dapat membentuk kepribadian bangsa (Triana et al., 2025). Pendidikan karakter ini dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan pemberian materi tentang perlindungan anak dan bagaimana kewajiban serta hak guru sebagai wakil dari orang tua di sekolah (Umardani & Liany, 2017). Kedua, Literasi Digital Beretika: Mengintegrasikan nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial agar remaja mampu menjadi warga digital yang berbudaya. Nilai Pancasila akan menjadi tameng utama yang mencegah remaja terpapar ideologi kekerasan di internet. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dapat menjadi strategi dalam mengurangi bibit-bibit radikalisme di era digital (Setiawan et al., 2024).

Ketiga, Sinergi Tri-Pusat Pendidikan: Melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling menguatkan untuk memastikan pengawasan emosional yang stabil. Kolaborasi multipihak akan mendorong terciptanya ekosistem perlindungan anak (Iliyatunnisa et al., 2025). Hal ini menjadi salah satu strategi pencegahan yang efektif meliputi kegiatan pendidikan karakter berbasis kurikulum, pelibatan

aktif orang tua, pembentukan Satgas Anti-Kekerasan, penerapan pendekatan rehabilitatif seperti bimbingan kelompok. Hal ini menekankan bahwa kolaborasi multipihak penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, kita tidak hanya sekedar mendidik siswa agar cerdas secara kognitif, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas moral dan keberpihakan pada kemanusiaan. Solusi lain atas kasus pelemparan bom molotov di Kalimantan Barat ini adalah melalui upaya penanaman budaya musyawarah sejak dini di lingkungan sekolah sebagai satu-satunya cara terbaik dalam menyelesaikan masalah atau perselisihan. Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya prinsip demokrasi, musyawarah, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Nilai ini bukan sekedar relevan dengan kehidupan pemerintahan, tetapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam lingkup pendidikan seperti di sekolah sebagai salah satu upaya dalam membentuk karakteristik siswa yang demokratis sejak dini (Rukhiyah Shofa et al., 2025)

SIMPULAN

Fenomena pelemparan bom molotov di SMPN 3 Sungai Raya merupakan manifestasi nyata dari krisis internalisasi nilai Pancasila di kalangan remaja, yang diperparah oleh tekanan emosional dan minimnya literasi digital. Secara reflektif, penelitian ini menegaskan bahwa degradasi moral bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam menghadirkan Pancasila sebagai living values di ruang pendidikan. Internalisasi yang selama ini cenderung formalistik dan teoretis terbukti tidak cukup kuat dalam membendung arus budaya destruktif di era digital (Pramudita et al.,

2025). Oleh karena itu, reaktualisasi nilai Pancasila harus bergeser dari pendekatan instruksional menuju pendekatan yang lebih dialogis, humanis, dan partisipatif, di mana sekolah, keluarga, dan masyarakat bersinergi menciptakan ruang aman yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keadilan restoratif.

Adapun rekomendasi bagi pihak sekolah dan pemangku kebijakan, pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan pemantauan kesehatan mental siswa serta penguatan literasi digital yang kritis. Penanganan perilaku menyimpang pada remaja, khususnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), seyogianya tidak lagi mengandalkan pola penghukuman yang represif, melainkan mengedepankan pendekatan restoratif yang memulihkan martabat dan relasi sosial. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas studi dengan meninjau efektivitas program intervensi berbasis komunitas secara jangka panjang, serta mengeksplorasi peran platform digital sebagai media edukatif untuk penyebaran nilai-nilai Pancasila yang lebih relevan dan menarik bagi generasi Z dan Alpha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>
- Audina, N., Supriani, A., Lestari, G., Angreselda, S., & Widyawati, S. (2026). Analisis Permasalahan Pelanggaran Nilai Pancasila Dalam Lingkungan Pendidikan Melalui Kasus Ledakan Di SMA 72 Jakarta. 2(2021), 177–183.
- Iliyatunnisa, Fardana, N. A., Psikologi, F., Airlangga, U., & Info, A. (2025). *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi LITERATUR REVIEW: PERAN GURU DALAM MENDUKUNG KESEHATAN*. 326–338.
- kevin Ervianto, M. (2025).

Implementasi nilai keadilan sosial dalam sila kelima pancasila sebagai dasar pemenuhan hak asasi manusia di indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3, 20–24. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

Lestari, S. O., & Kurnia, H. (2022). Peran Pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v5i2.23179>

Liany, L. (2011). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengembangan Hukum Nasional. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11, 38–57.

Liany, L., & Anisariza, N. U. (2025). Edukasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Participatory Action untuk Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Negeri 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 237–246. <https://doi.org/10.54082/jipm.803>

Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2017). Penyuluhan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Negeri 39 Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 1(1), 6–15. <https://doi.org/10.35334/jpmb.v1i1.237>

Liany, L., Purwaningsih, E., Basrowi, B., Queroda, P. G., & Iskandar, F. P. (2025). Evaluating the Fulfillment of Health Rights for Persons with Disabilities in Jakarta's Community Health Centers. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(3), 445–468. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i3.445-468>

Maret, N., Nabila, G., Rahmania, A., Elya, R. A., Nasywa, A., Ningsih, L. R., Roihan, M., & Novirson, R. (2026). *Peran Keluarga dan Sekolah dalam Deteksi Dini Perilaku Bermasalah pada Remaja : Sebuah Tinjauan Literatur*.

Nur, R. A. P., Truvadi, L. A., Agustina, R. T., & Salam, I. F. B. (2023). Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia: Tinjauan dan Implikasi. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 501–510. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.54>

Permatasari, A., Liany, L., & Mahmud, A. (2020). DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN

HUKUM (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2043>

Pramudita, N., Rafa, N., Utomo, P., Hussein, K., & Ayu, K. (2025). Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Tingkat Perilaku Kenakalan Remaja di Era Digital Saat Ini Ilmu Komunikasi , Universitas Semarang , Kota Semarang , Indonesia Perlindungan Anak , Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia " dengan jelas menunjukkan peru. *Dialogika : Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi*, 1, 231–244.

Rukhiyah Shofa, G., Alfiatu Rohmatin, R., Aulia Azahra, P., Rizky Ferdiansyah, M., Fadilah Akbar, N., Rasya Anugrah Putra Rafa, M., Wahyuni, S., Nugraha, A., Wiguna, S., Rafi Akmal, M., Hamdi Muhammad, H., Iqbal Mulana, M., & Herdiana, D. (2025). Sosialisasi Sila Ke-4 Pancasila Dalam Mewujudkan Partisipasi Aktif Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Biru 2 Majalaya. *Volume*, 3, 386–394.

Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). *MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA*. 7(1), 53–58.

Septiani, L. C., Liany, L., Adzkia, D., Khairunnisa, A., Fayza, A., Afrizah, M., Haifa, N. M. C., Zulfansa, R., Salsabila, S., & Faturrahman, R. (2025). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AKSI DEMONSTRASI: STUDI KASUS DUGAAN PENGHILANGAN PAKSA DEMONSTRAN DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT , ABSTRAK : PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan hak untuk menyatakan pendapat sebagai . 5*, 21–39.

Setiawan, B., Setiawan, B., Hidayat, E. R., Widodo, P., Risma Saragih, H. J., & Sukendro, A. (2024). Tantangan dan Strategi Pencegahan Konflik akibat Intoleransi dan Radikalisme di Era Digital untuk Mewujudkan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 615–623. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3087>

Sila Ke-, P., Terkait dengan Pembunuhan di Papua Sesuai Uu, P., Saly, J. N., Karin Ferselli, A., Sabrina Azahra, N., Muflihah, R., Mari Baloch, S., & Salwa Nur Eida, T. (2023). Aurellia Karin Ferselli, Natasya Sabrina Azahra, Rifdah Muflihah , Sania Mari Baloch, Sulastri, Tri Salwa Nur Eida INNOVATIVE. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2658–2663.

Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia (Pancasila Value Implementation in Handling Intolerance in Indonesia). *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3), 408–425.

Triana, S., Maria, E. S., Lusi, C. M., Isya, C., & Gea, S. W. (2025). *PERAN PANCASILA DALAM MENCEGAH BULLYING SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN ETIKA / MORAL*. 9(6), 18–26.

Umardani, M. K., & Liany, L. (2017). Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (Sma). *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 115–130. <https://doi.org/10.33096/balireso.v2i2.34>